

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024. Rencana Kerja yang telah ditetapkan berdasarkan pada prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman kepada RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan maksud untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang professional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran. Selain itu, untuk menjabarkan RKPD Tahun 2021 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, terutama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2021 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

Adapun tujuan lain yang ingin dicapai adalah :

- 1) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2021–2026 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan.
- 2) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 kedalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- 3) Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023 mengacu pada APBD tahun berjalan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap Renja Satpol PP Kabupaten Gowa Tahun sebelumnya meliputi indikator program (*outcome*) dan indikator kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/ kegiatan dan realisasi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan pada evaluasi pelaksanaan Renja yang telah disusun tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun hasil realisasi program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, yaitu:

1. Terdapat Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu Program/Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota sebesar 75,59%. Hal itu dikarenakan jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diCegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan menurun dari target 80 kasus menjadi 60 kasus.
2. Program/kegiatan yang memenuhi target yaitu sebanyak 8 kegiatan dengan masing-masing realisasi sebesar 100%.
3. Untuk realisasi program/kegiatan yang melebihi target yaitu tidak ada.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain:

1. Masyarakat mulai paham akan penegakan Perda yang berlaku.
2. Sosialisasi terkait Penegakan Perda telah dilakukan meskipun masih minim.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Adapun Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

1. Perlunya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Trantibum agar lebih maksimal.
2. Perlunya peningkatan jumlah PPNS.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerinah Daerah/Tujuan/Sasa ran Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Tujuan : Meningkatkan rasa aman dan nyaman									
	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan								
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	100		14.07	14.07	100	17.91	32	31.98

					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100		23.08	23.08	100	19.23	42	42.31
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	26 Dokumen		6	6	100	5	11	42.31
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100		20	20	100	20	40	40.00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang		48	48	100	48	96	40.00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 Laporan		20	20	100	48	68	68.00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100		1.79	1.79	100	24.55	26.34	26.34
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	423 Paket		3	3	100	105	108	25.53
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	25 Dokumen		5	5	100	5	10	40.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100		20	20	100	20	40	40.00

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Paket		3	3	100	3	6	40.00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	155 Item		31	31	100	31	62	40.00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen		3	3	100	3	6	40.00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		12	12	100	12	24	40.00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		12	12	100	12	24	40.00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		51.11	51.11	100	0	51.11	51.11
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	45 Unit		23	23	100	0	23	51.11
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		20	20	100	20	40	40.00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 Laporan		2	2	100	2	4	40.00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 Laporan		2	2	100	2	4	40.00

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100		13.64	13.64	100	21.59	35.23	35.23
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		22	22	100	32	54	41.54
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit		14	14	100	25	39	34.21
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100		21.39	18.61	87.80	20.70	39.31	39.31
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100		22.78	17.22	75.59	21.39	38.61	38.61
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diCegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	350 Kasus		80	60	75	75	135	38.57

					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40.00
					Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana Jumlah Aparat yang bekerjasama dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40.00
					Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100			20	20	100	20	40	40.00
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40.00
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani Sesuai SOP	10	Laporan		2	2	100	2	4	40.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Analisis indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan indikator yang mengacu pada NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Permendagri 18/2020 Hal 177 s.d Hal 291) 60-61 satpol	90%	90%	90%	90%	90%		90%	90%	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Permendagri 86/2017 Hal 206 s.d Hal 233	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pengobatan		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Standar operasional prosedur Satpol PP		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

		Standar sarana dan prasarana Satpol PP		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
			ikk outcome :									
			1. Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%		90%	90%	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
			ikk output:									

			<i>Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani</i>	80	75	70	65	60		65	60	
			<i>Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan</i>	2860	2860	2860	2860	2860		2860	2860	
			<i>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</i>	150	145	140	135	173		140	135	
			<i>Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</i>	3	3	3	3	3		4	4	
			<i>Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum</i>	2	2	2	2	2		2	2	
			<i>Tersedianya sarana prasarana minimal</i>	22	32	32	32	32		32	32	

1	Indikator Kinerja Tujuan : Tercapainya wilayah yang aman dan nyaman			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Indikator Kinerja Sasaran :											
	- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			90%	90%	90%	90%	90%		90%	90%	
	- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3												
4			IKK Outcome									
5			IKK Output									

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Salah satu peluang yang dimanfaatkan satpol PP yaitu besarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Perlaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pengamanan asset daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepala Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik. Adapun Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya local dan teknologi.

3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Sapol PP Kab. Gowa yaitu ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada sangat kurang dan meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat, termasuk penggunaan bahu jalan (trotoar) yang tidak sesuai fungsinya. Penyebab dari masalah tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perda dan perkada karena keterbatasan anggaran dan penataan lokasi jualan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum maksimal.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang, maka ditentukan isu strategis Satpol PP Kab. Gowa sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perda dan Perkada yang perlu ditingkatkan;
2. Masih terbatasnya cakupan petugas perlindungan masyarakat;
3. Peralatan dan perlengkapan operasional Penegakan Perda/Perkada belum memadai;
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
5. Masih terbatasnya tenaga penyidik pegawai negeri sipil;
6. Belum maksimalnya pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
7. Keterbatasan anggaran;
8. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa,

kemudian dibandingkan dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan, dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kb. Gowa. Review terhadap rancangan awal RKPD dijabarkan pada tabel berikut

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gowa	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	100	5,932,926,661	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gowa	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	100	1,896,824,300	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Gowa	<i>Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	100	39,128,600	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Gowa	<i>Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	100	39,128,600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6	39,128,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6	39,128,600	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100	4,036,102,361	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungguminasa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	3,944,907,361	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungguminasa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	3,944,907,361	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sungguminasa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20	91,195,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sungguminasa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20	91,195,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100	115,077,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100	115,077,200
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sungguminasa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	105	98,550,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sungguminasa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	105	98,550,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	5	16,527,200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	5	16,527,200
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	1,023,811,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	1,023,811,300

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungguminasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	16,118,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungguminasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	16,118,100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sungguminasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	31	21,577,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sungguminasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	31	21,577,200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	7,200,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungguminasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	35,949,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungguminasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	35,949,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	942,967,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	942,967,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gowa	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100	158,715,530	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gowa	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100%	174,587,083
	Pengadaan Mebel	Sungguminasa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11	50,000,000	Pengadaan Mebel	Sungguminasa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11	55,000,000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungguminasa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	108,715,530	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungguminasa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	119,587,083
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	333,015,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gowa	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	333,015,200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	31,389,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	31,389,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	301,626,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	301,626,200
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gowa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	270,714,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gowa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	270,714,800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Sungguminasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	248,664,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungguminasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	22	248,664,800

	Lapangan							Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungguminasa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	22,050,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungguminasa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	22,050,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Sungguminasa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2	80,480,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Sungguminasa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2	88,528,000	
B	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Gowa	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	7,919,516,800	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Gowa	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	7,919,516,800	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gowa	Persentase Gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100	7,874,100,000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gowa	Persentase Gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100	7,874,100,000	

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Sungguminasa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diCegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	65	7,669,200,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Sungguminasa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diCegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	65	7,669,200,000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	15,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	15,000,000

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungguminasa	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	180,540,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungguminasa	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	180,540,000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Sungguminasa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	35,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Sungguminasa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	35,000,000
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana Jumlah Aparat yang bekerjasama dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	189,900,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungguminasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana Jumlah Aparat yang bekerjasama dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	189,900,000

	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	15,000,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Sungguminasa	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	15,000,000
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentrasi Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	45,416,800	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentrasi Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	45,416,800
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1	29,390,000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1	29,390,000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sungguminasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani	2	16,026,800	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sungguminasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	2	16,026,800

			Sesuai SOP					Gebernur yang dapat ditangani Sesuai SOP			
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Gowa	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	100	30,000,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Gowa	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	100	30,000,000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	30,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Sungguminasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	30,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gowa merupakan penjabaran dari visi dan misi kabupaten Gowa, yang dituang ke dalam 9 butir prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- A. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui **prioritas wajib** :
 - 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat yang berkarakter;
 - 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - 3. Peningkatan partisipasi masyarakat.
- B. Peningkatan perekonomian melalui **sektor unggulan** :
 - 1. Pengembangan pertanian modern;
 - 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
 - 3. Penguatan peran UMKM.
- C. **Prioritas penunjang** peningkatan kualitas SDM dan perekonomian :
 - 1. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
 - 2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
 - 3. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran utama pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yaitu :

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan (Misi 3)	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat (Tujuan 3)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada kualitas lingkungan air, lingkungan udara, dan lingkungan tutupan lahan.
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas (Misi 4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien (Tujuan 4)	Meningkatnya kualitas pelayanan Public	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan public melalui pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan public yang berbasis elektronik.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Pemerintah Sulawesi Selatan berdasarkan dokumen RPJMD telah menempatkan sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Ada tiga cakupan yang dinilai, yaitu cakupan petugas linmas, cakupan ketentraman, keamanan dan keindahan, dan Penegakan Perda. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3.3 Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa melalui berbagaikegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ditahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sesuai dengan Renstra 2021-2026 adalah Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur.

b. Sasaran

Untuk sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, yaitu meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perhatikan Tabel di bawah ini :

TABEL
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI	CAPAIAN
				2022	2023	2024	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Tercapainya wilayah yang aman dan nyaman	Persen	100	100	100	100	100
2	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat							
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	90	90	90	90	90
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa Tahun 2024 memuat program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Satpol PP Kab. Gowa Tahun 2021-2026, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, telah dirumuskan program dan kegiatan berdasarkan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal membantu Kepala Daerah mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan teratur, serta melaksanakan Penegakan Perda, sesuai dengan misi Kepala Daerah salah satunya mewujudkan tata kelola pemerintah inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Gowa.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa Tahun 2024 mencakup 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 13,902,906,261. Adapun indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut:

Indikator Program/Kegiatan

NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	Persen	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	Persen	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	Persen	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Persen	100%	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentrasi Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100%	
--	---	---	--------	------	--

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gowa**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar				<i>berdasarkan rincian belanja</i>				
1	05				Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	Gowa	100	5,932,926,661			100	6,526,219,327
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	Gowa	100	39,128,600			100	43,041,460
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungguminasa	6	39,128,600			5	43,041,460

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	Gowa	100	4,036,102,361			100	4,439,712,597
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sungguminasa	48	3,944,907,361			48	4,339,398,097
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sungguminasa	20	91,195,000			20	100,314,500
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	Gowa	100	115,077,200			100	126,584,920
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Sungguminasa	105	98,550,000			105	108,405,000
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Sungguminasa	5	16,527,200			5	18,179,920

1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Gowa	100	1,023,811,300			100	1,126,192,430
1	01	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Sungguminasa	3	16,118,100			5	17,729,910
1	01	02	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sungguminasa	31	21,577,200			31	23,734,920
1	01	02	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sungguminasa	3	7,200,000			5	7,920,000
1	01	02	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungguminasa	12	35,949,000			12	39,543,900
1	01	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungguminasa	12	942,967,000			12	1,037,263,700
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	Gowa	100	158,715,530			100	174,587,083
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sungguminasa	11	50,000,000			11	55,000,000

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sungguminasa	3	108,715,530			4	119,587,083
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gowa	100	333,015,200			100	366,316,720
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sungguminasa	2	31,389,000			2	34,527,900
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sungguminasa	2	301,626,200			2	331,788,820
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Gowa	100	270,714,800			100	297,786,280
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sungguminasa	22	248,664,800			32	273,531,280
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sungguminasa	14	22,050,000			25	24,255,000

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Sungguminasa	2	80,480,000			2	88,528,000
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Gowa	100	7,910,156,800			100	8,701,172,480
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	Gowa	100	7,864,740,000			100	8,651,214,000
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diCegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Sungguminasa	65	7,669,200,000			65	8,436,120,000

					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Sungguminasa	1	15,000,000			1	16,500,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketetiban Umum	Sungguminasa	1	180,540,000			1	198,594,000
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sungguminasa	30	35,000,000			30	38,500,000

1	05	02	2.01	06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana Jumlah Aparat yang bekerjasama dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sungguminasa	1	189,900,000			1	208,890,000
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Sungguminasa	12	15,000,000			12	16,500,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentrase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100	45,416,800			100	49,958,480
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sungguminasa	1	29,390,000			1	32,329,000

1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani Sesuai SOP	Sungguminasa	2	16,026,800		2	17,629,480
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	Gowa	100	30,000,000		100	33,000,000
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Sungguminasa	1	30,000,000		1	33,000,000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Gowa Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2023.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2022 .Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sungguminasa, 13 Januari 2023

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KAB. GOWA,**



ALIMUDDIN TIRO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19630816 198603 1 036